

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

BPKN merupakan Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen yang hanya ada satu-satunya di Indonesia. BPKN mempunyai tugas memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Konsumen merupakan kekuatan besar dan hebat dalam membangun perekonomian bangsa, oleh karena itu diperlukan peran negara untuk melindungi hak-hak konsumen. Ketidakselarasan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha yang berkembang dalam dinamika masyarakat memerlukan kehadiran suatu lembaga yang dapat menjalankan fungsi kontrol terhadap berbagai kebijakan pemerintah sehingga menjamin hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha dalam keselarasan tatanan yang berdasarkan harmoni dan keadilan.

BPKN didirikan pada tanggal 21 juli 2001 pada peraturan pemerintah nomer 57 tahun 2001 memiliki visi dan misi menjadi lembaga terdepan bagi terwujudnya konsumen yang bermartabat dan pelaku usaha yang bertanggung jawab. Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sejalan dengan tugas dan fungsi BPKN strategi dan kebijakan yang diterapkan adalah, meningkatkan edukasi kepada dunia usaha dan konsumen, membangun sistem informasi perlindungan konsumen nasional yang terpercaya, mengembangkan perlindungan konsumen yang berwawasan lingkungan, meningkatkan peran dan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen dan meningkatkan sumberdaya dan kemampuan nasional dalam pemantauan dan pengendalian lalu lintas barang dan jasa.

Namun setelah proses *survey* dan wawancara dilakukan, Badan Perlindungan Konsumen RI tidak memenuhi standar luasan yang ditentukan, Hal tersebut menyebabkan munculnya masalah lain yang memiliki dampak terhadap

kelengkapan fasilitas dan kualitas pelayanan. Beberapa masalah utama yang disebabkan oleh keterbatasan lahan yaitu : (1) luasan ruang yang kurang sehingga fasilitas tidak dapat menampung seluruh kegiatan yang ada di BPKN-RI, (2) tidak adanya beberapa ruang yang sangat dibutuhkan, seperti ruang rapat kecil bagian, aula untuk pertemuan kerjasama dengan lembaga lain, ruang arsip, ruang kerja masing-masing komisaris, ruang pers dan ruang laktasi. (3) terdapat beberapa ruang yang tidak sesuai standar seperti ruang setiap komisi yang terdiri dari 4-5 komisaris hanya berukuran 5X6m².

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kantor BPKN-RI belum dapat memfasilitasi seluruh kegiatan didalamnya dari sisi luasan lahan, sehingga dirasa perlu adanya perluasan lahan dengan pengolahan elemen interior yang lebih baik dilokasi Jl. Merpati 3 RW.10, Gn. Sahari Sel. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. Kantor BPKN-RI ini akan berada pada lantai 1-4 gedung dapendra. Tata ruang kantor gedung ini belum mendukung aktivitas yang ada pada kantor bpkn sehingga perancangan kantor ini akan menyesuaikan aktivitas BPKN-RI. Pada gedung Dapendra ini menggunakan kaca pada bagian fasad depan dan samping kiri gedung yang menghadap timur sehingga cahaya cahaya alami masuk kedalam gedung, namun pada gedung ini tidak adanya bukaan untuk penghawaan alami, sehingga suhu ruang perlu dikondisikan dengan penghawaan buatan. Diharapkan perancangan interior kantor BPKN pada lokasi baru ini dapat memfasilitasi segala kegiatan yang ada di BPKN melalui penataan interior dengan pendekatan aktifitas kerja dan fungsi ruang sehingga terciptanya efektifitas kerja di kantor BPKN-RI.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di atas serta hasil identifikasi masalah yang telah dilakukan pada objek perancangan, ditemukan beberapa masalah yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kantor BPKN-RI belum dapat memfasilitasi aktifitas yang ada dengan standarisasi dan organisasi ruang yang sesuai sehingga diperlukannya relokasi.

2. Pembaruan tata ruang kantor yang menyesuaikan dengan standar kantor, kebutuhan kantor dan aktivitas pada kantor bpkn yang dapat mempengaruhi efektivitas dan produktivitas kerja
3. Pengaplikasian sistem sirkulasi dengan menyesuaikan ruang-ruang secara *vertical* maupun *horizontal* dan hubungan antar ruang yang mampu menjaga alur aktivitas yang ada di kantor BPKN-RI
4. Tidak adanya bukaan untuk penghawaan alami menyebabkan suhu ruang tidak stabil sehingga penggunaan penghawaan buatan diperlukan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah diantaranya :

1. Bagaimana merancang interior kantor bpkn dengan tata ruang kantor yang menyesuaikan dengan standar kantor, kebutuhan kantor dan aktivitas yang ada dikantor BPKN-RI ?
2. Bagaimana menerapkan sistem sirkulasi dengan menyesuaikan ruang-ruang secara *vertical* maupun *horizontal* dengan hubungan antar ruang yang mampu menjaga alur aktivitas yang ada dikantor BPKN-RI ?

1.4 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dan sasaran perancangan kantor Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI yaitu :

1. Tujuan :
 - Merancang intrerior kantor BPKN-RI yang dapat memwadhahi aktivitas kantor dengan tata ruang dan luasan ruang yang ideal sehingga dapat meningkatkan efektivitas kerja kantor BPKN-RI.
2. Sasaran :
 - Mengatasi masalah umum yang terjadi sebelumnya pada kantor BPKN-RI seperti luasan ruang, menambah fasilitas ruang ruang rapat kecil bagian, aula untuk pertemuan kerjasama dengan lembaga lain, ruang arsip, ruang setiap komisaris, ruang pers, ruang menyusui dsb.

- Membuat tata ruang kantor yang sesuai dengan aktivitas pada kantor BPKN sehingga dapat meningkatkan efektivitas kerja.

1.5 Batasan Masalah

Terdapat beberapa batasan dalam perancangan interior kantor BPKN-RI, dan berikut merupakan batasan perancangan yang diterapkan :

a. Objek perancangan

Objek perancangan yang dirancang adalah interior kantor BPKN-RI, yaitu sebuah kantor pemerintah yang mana bertugas sebagai badan perlindungan konsumen nasional republik Indonesia.

b. Luasan status proyek

Luasan proyek 2932.925 m² dengan status proyek adalah *new design*.

c. Pengguna

Kantor BPKN-RI mewadahi para pejabat pemerintah, pegawai dan staff yang bekerja di dalam lingkup Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI dan pengunjung / tamu yang berkunjung ke kantor BPKN-RI.

1.6 Manfaat Perancangan

Manfaat yang dapat diambil dari perancangan interior kantor BPKN-RI ini diantaranya :

a. Bagi Perancang

- Memperoleh pengetahuan terkait perancangan interior kantor BPKN-RI
- Memenuhi syarat kelulusan s1 desain interior TELKOM *university*

b. Bagi Institusi

Dapat di jadikan sebagai koleksi karya perancangan interior Kantor Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI salah satu akademisinya.

c. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas pembangunan sarana dan prasarana kantor pemerintah.

1.7 Metode Perancangan

Dalam suatu perancangan desain, diperlukan data-data dan juga informasi lengkap, relevan dan jelas. Oleh karena itu, dalam mengumpulkan dan mendapatkan data-data diperlukannya sebuah metodologi pengumpulan data. Adapun metodologi pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1.7.1 Pengumpulan Data

a. Data Primer

- Observasi

Mengamati dan menganalisis kondisi *existing* objek perancangan. Mulai dari lokasi, lingkungan sekitar, akses transportasi, tampak luar bangunan, dan seluruh kegiatan serta elemen interior yang terdapat pada bangunan tersebut.

- Wawancara

Tahap ini dilakukan dengan cara bertanya secara langsung saat melakukan survey ke Kantor Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI dan juga melalui telepon dengan narasumber ibu Siti Mulianny dengan posisi sebagai kabag bagian umum dan kepegawaian dan Bpk. Rusdi sebagai salah satu komisaris di BPKN-RI.

- Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengambil foto maupun video dari Objek Perancangan maupun Pembanding sebagai data pendukung dalam perancangan. Foto dan video yang diambil berhubungan dengan interior bangunan.

b. Data Sekunder

- Studi Literatur

Mencari informasi dan data-data melalui buku-buku, jurnal mengenai perancangan kantor pemerintahan, serta literatur-literatur dari internet yang berkaitan tentang perancangan ini.

1.7.3 Metode Analisa Data

Data yang sudah dikumpulkan dianalisa dengan mengambil garis besar berdasarkan permasalahan yang ada. Berikut adalah analisa yang diuraikan :

- **Analisa Kebutuhan Ruang Utama**
Analisa kebutuhan ruang dilakukan berdasarkan aktivitas pekerjaan yang dilakukan di dalam kantor. Klasifikasi pengguna berdasarkan aktivitas pelayanan public maupun administratif berdasarkan struktur organisasi yang ada.
- **Analisa Kebutuhan Ruang Tambahan**
Analisa tersebut dilakukan dengan menganalisa kebutuhan untuk menunjang pekerjaan dan kebutuhan, seperti area penyimpanan arsip, pantry, mushala, dan ruang lainnya.
- **Analisa Pengisi Ruang**
Analisa ini dilakukan berdasarkan kebutuhan pengguna ruang untuk memenuhi kebutuhan aktivitas pekerja.
- **Analisa Kondisi Ruang**
Hal ini menganalisa kondisi pencahayaan, penghawaan dan tingkat kebisingan yang ada di interior kantor.

1.7.4 Programing

Membuat data analisa lanjutan sebagai acuan untuk perancangan interior kantor BPKN-RI, data tersebut berupa pola aktivitas, besaran ruang, kebutuhan ruang, *zoning*, *blocking*, *matrix* ruang, *bubble diagram* dan sebagainya.

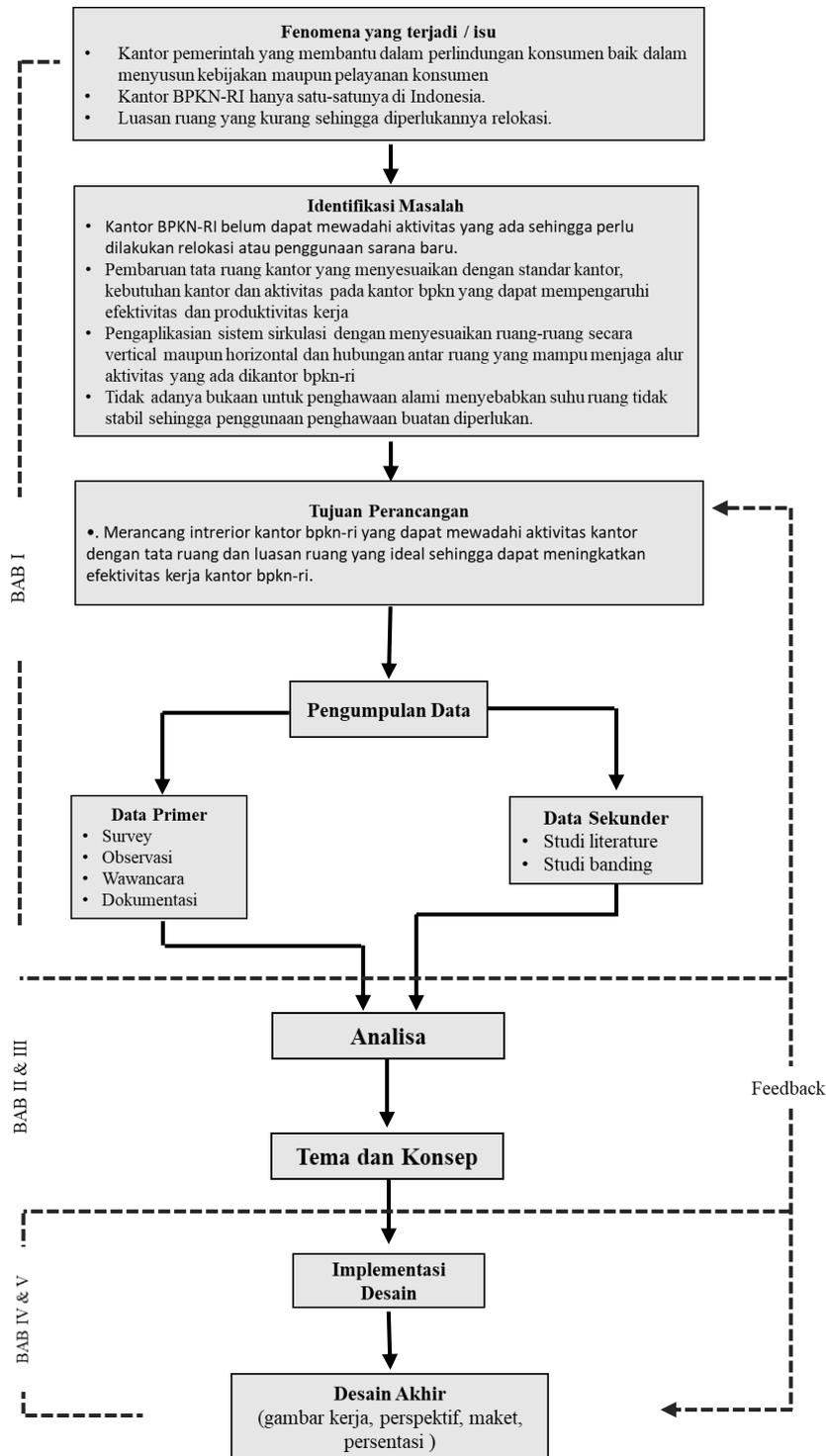
1.7.5 Tema Konsep

Menentukan tema dan konsep perancangan sebagai solusi dari permasalahan yang telah ditemukan melalui proses analisa. Tema dan konsep yang telah ditentukan nantinya akan diterapkan pada element interior perancangan yang akan dibuat dan merupakan hasil akhir dari perancangan interior kantor BPKNRI.

1.7.6 *Output Akhir*

Merupakan tahap akhir perancangan, yang mana keseluruhan tahapan telah dilakukan sehingga akan didapatkan output akhir perancangan berupa gambar kerja teknik, maket, perspektif ruang, skema material dan lainnya.

1.8 Kerangka Berfikir



1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang dari perancangan interior kantor BPKN-RI, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan perancangan, tujuan dan sasaran, Manfaat Perancangan, metode perancangan, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN LITERATUR DAN DATA PERANCANGAN

Bab ini berisi kajian literatur dan definisi terkait objek perancangan yang didapat dari buku, standar, jurnal, tesis, saduran , dan karya ilmiah lain yang digunakan sebagai dasar perancangan. Selain itu pada bab ini juga terdapat analisa dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya pada kajian literatur, definisi juga hasil *survey*, dokumentasi, wawancara dan observasi.

BAB III KONSEP PERANCANGAN PUSAT KEBUDAYAAN ITALIA DI JAKARTA

Bab ini berisi penjabaran tema dan konsep yang akan digunakan dalam perancangan interior kantor BPKN-RI.

BAB IV PERANCANGAN KHUSUS

Bab ini berisi uraian hasil dari perancangan khusus desain interior kantor BPKN-RI

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan proposal perancangan interior kantor BPKN-RI dan saran bagi objek perancangan interior.